

# Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil

PRIMADINI PUTRI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

**Abstract:** *The giving of autonomy to a region was a trial to cover the development in every sector. Having autonomy, each region has right to arrange its own mission and control the development in its region by using its own budget so that the regional and sectoral development could be balance by increasing the participation of society. The development is natural process in getting the purpose of the country, the welfare in whole society. The welfare was indicated by increasing income. In creasing income was related to increasing productivity. It natural process can be done if the development assumptions whether the job opportunity or participation applied well. Everybody has equal productivity and rational behaviour.*

**Keyword:** *Autonomy, Encouragement Society and The Participation of Society*

Azas penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menciptakan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat adalah azas desentralisasi yang dioperasionalkan dalam kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Secara prinsipil, terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi. Hak dan wewenang untuk memamanajemi daerah, dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam memamanajemi daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu diletakkan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan besar terhadap peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Fenomena kemiskinan yang terjadi saat

sekarang ini membutuhkan intervensi pemberdayaan. Dimana masalah pokok yang ditemui yang sesuai dengan kondisi strategis wilayah Kabupaten Agam adalah: (*Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kab. Agam*)

1. Masih rendahnya pendapatan masyarakat.
2. Masih rendahnya derajat kesehatan dan gizi balita.
3. Kurangnya akses sektor informal dan rumah tangga terhadap perbankan dan sumber dana.
4. Tingginya angka angkatan kerja yang belum bekerja.
5. Masih adanya perkampungan yang jauh dari akses perhubungan.
6. Belum berfungsinya fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial terhadap pertumbuhan.

Proses pemberdayaan hendaknya dapat dituangkan dalam bentuk program aksi yang jelas disertai oleh langkah-langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai motto dalam

masalah penanggulangan kemiskinan yaitu “*Bantuan Menyebabkan Ketergantungan, Pemberdayaan Menyebabkan Kemandirian*” (Sekretariat TKPK Kab. Agam) dimana dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang berupa dana/uang tunai langsung, akan membuat masyarakat menjadi manja tanpa adanya usaha dari mereka untuk dapat memberdayakan kehidupan mereka secara lebih baik. Akan tetapi, dengan memberikan pemberdayaan langsung kepada masyarakat akan membuat masyarakat terlatih untuk bisa menjalankan kehidupan yang mandiri tanpa harus selalu menunggu kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam?
- b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam?

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan suatu proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Senada dengan pengertian di atas Prijono dan Pranarka (1996: 3) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke-

pada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang senyawa dan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan serta membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Tujuannya adalah:

1. Membantu pengembangan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil seperti: buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kelompok wanita yang didiskriminasi dan sebagainya.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Untuk membangun keberdayaan masyarakat yang lemah, *Kartasamita* dalam Widiputranti dkk (2005: 18-19) dikemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- Dalam hal ini perlu diterapkan langkah nyata dengan menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan, listrik) maupun sosial (pendidikan, fasilitas pelayanan sosial) yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah.
- Melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau

makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Berbagai program pembangunan maupun program pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM menekankan bahkan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya keikutsertaan/mengikutsertakan. Seseorang yang melakukan partisipasi dapat dikarenakan oleh kesadaran sendiri atau karena dimotivasi oleh seseorang/pimpinan.

Sumarto (2003: 17) berpendapat, partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Senada dengan Sumarto, Cohen dan Uphoff dalam Wuryantono (2005: 168) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/pembuatan keputusan kegiatan, penerapan/pelaksanaan keputusan serta menikmati dan mengevaluasi hasil dari kegiatan itu.

Menurut Ach. Wazir Ws (1999) dalam [www.google.com](http://www.google.com) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Menurut Mubyarto (2000: 28), partisipasi masyarakat adalah sebagai kesetiaan untuk membantu berhasilnya program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Selanjutnya Siagian (2000: 45) membagi partisipasi masyarakat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

## 1. Partisipasi Pasif

Merupakan sikap perilaku dan tindak tanduk melakukan hal-hal yang menghalangi kelancaran jalannya roda pemerintahan.

## 2. Partisipasi Aktif

- a. Turut memikirkan nasib dengan memanfaatkan lembaga/lembaga yang ada dalam masyarakat sebagai penyalur aspirasi.
- b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti pimpinan, tokoh masyarakat yang bersifat formal maupun informal.
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, seperti membayar pajak.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan pemerintah yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan untuk kepentingan bersama.

Sedangkan menurut Sudriamunawar (2006: 47) sendiri, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan dan menunjukkan prioritas. Dan partisipasi menurut Suryaningrat dalam Sutrisna (2006: 35) adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang.

Selanjutnya menurut Nitisemito (1993: 53), tentang sifat ciri-ciri partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

- a. Sifat-sifat dan partisipasi masyarakat adalah:
  - Partisipasi haruslah bersifat sukarela.
  - Berbagai isu dan masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara objektif.
  - Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi atau aspek dari program yang akan disajikan.

- Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan efektif.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat adalah:
- Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
  - Penginterpretasikan yang dangkal terhadap agama.
  - Kecendrungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah pada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara.
  - Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan
  - Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Pelaksanaan program dalam partisipasi masyarakat pada prakteknya mengandung beberapa pengertian (Sudriamunawar, 2006: 49):

- 1) Keterlibatan dalam proses; penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap proses perencanaan pembangunan pemerintah harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dapat dukungan dalam pelaksanaannya.
- 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber biaya pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan sebagainya.
- 3) Keterlibatan memetik hasil dan manfaat pembangunan secara adil dan merata.

Bagian-bagian daerah atau setiap kelompok masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan dan pembinaan tertentu.

Menurut Cohen (1997: 31), dengan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sebab dukungan masyarakat adalah merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain:

- a) Partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Kondisi ini semakin meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mensukseskan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan operasional program pembangunan yang dilaksanakan.
- c) Partisipasi dalam menerima hasil, dimana masyarakat diminta untuk memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat digunakan oleh beberapa generasi yang akan datang.

Berdasarkan pendapat di atas, agar terlaksananya pembangunan ataupun program-program yang dijalankan oleh pemerintah, dituntut partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses kegiatan.

## **METODE**

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan di duga.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang tergabung dalam pelaksanaan Program Bantuan Kredit Mikro Nagari melalui pola BMT, khususnya di Nagari Ampang Gadang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan* sebagai objek informan mengenai partisipasi masyarakat pada program BKMN di Nagari Ampang Gadang yang ditentukan berdasarkan metode *pusposive sampling*. Adapun *key informan* yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah berjumlah 2 orang, yaitu pendamping dan pengelola BMT Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek. Dimana penentuan *key informan* ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang ditetapkan adalah orang yang benar-benar mengetahui dan ikut terlibat dalam program pemberian bantuan kredit ini.

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Questioner atau angket

Dilakukan terhadap responden, dimana pertanyaan akan disiapkan terlebih dahulu secara tertulis. Karena hal ini akan diberikan kepada setiap responden para pelaku yang dianggap sebagai responden.

b. Wawancara

Dengan cara mengadakan wawancara, tanya jawab dengan responden dimana pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan.

c. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat di lokasi penelitian. Mengadakan pengamatan di lapangan tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kerja di dalamnya.

Setelah seluruh data yang diperlukan telah diperoleh, maka data tersebut kemudian di olah secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel yang disertai penjelasan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

## HASIL

### 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil

Program Bantuan Kredit Mikro Nagari (BKMN) merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam menjalankan program Bantuan Kredit Mikro Nagari ini dengan menggunakan pola/sistem syari'ah atau disebut juga dengan pola Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dengan adanya BKMN ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat penerima bantuan untuk dapat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan program yang dijalankan.

Maka untuk melihat partisipasi masyarakat dalam program BKMN yang menggunakan pola BMT di Nagari Ampang Gadang, akan penulis uraikan pada masing-masing indikator menurut jawaban responden berikut ini:

a) *Peran Serta dalam Proses Perencanaan Program*

Perencanaan merupakan tahapan awal dari suatu program yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan yang dalam hal ini untuk menjalankan program BKMN yang menggunakan pola syari'ah atau pola BMT, sangat diharapkan sekali partisipasi dari masyarakat penerima dan bantuan kredit. Disamping mereka juga harus memahami terlebih dahulu maksud dari program yang akan mereka jalankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**

**Tanggapan responden terhadap peran serta dalam proses perencanaan program**

No	Alternatif Jawaban	F	(%)
1.	Tinggi terhadap peran serta dalam proses perencanaan program	7	23,33
2.	Sedang terhadap peran serta dalam proses perencanaan program	23	76,67
3.	Rendah terhadap peran serta dalam proses perencanaan program	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam proses perencanaan program dikategorikan sedang karena 23 (76,67 %) mayoritas responden menanggapi-nya. Sedangkan yang menanggapi tinggi hanya sebagian kecil yaitu 7 responden (23,33 %) dan tidak responden yang menanggapi rendah. Sehingga untuk peran serta masyarakat dalam proses perencanaan program di kategorikan “Sedang” untuk keseluruhannya. Berdasarkan pada data tersebut di atas, peneliti menganalisisnya bahwa keikutsertaan masyarakat Tinggi dalam menghadiri sosialisasi BKMN yang menggunakan pola BMT. Sehingga, harapan pengelola BMT agar masyarakat bisa menghadiri sosialisasi untuk mengetahui program baru dari Pemerintah Provinsi tercapai dengan baik. Akan tetapi sosialisasi yang diberikan tersebut dipahami oleh masyarakat yang mengikuti pertemuan tersebut. Tidak maksimalnya pemahaman yang mereka dapatkan dikarenakan mereka hanya perlu/ingin mengetahui prosedur apa saja yang harus mereka lakukan agar mereka bisa mendapatkan dana bantuan kredit. Dalam tahapan proses perencanaan berikutnya, peran serta masyarakat sangat ditunggu sekali disini. Dimana mereka harus menentukan gagasan/usulan jenis kegiatan yang mereka jalani. Tetapi didapati bahwa partisipasi masyarakat Rendah dalam menentukan jenis kegiatan yang mereka lakukan. Pihak pengelola yang pada akhirnya menentukan jenis kegiatan apa yang mereka jalankan. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan program dinilai “Sedang” karena rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam mengajukan usulan jenis kegiatan yang mereka jalankan dan kurangnya pemahaman dari program yang telah disosialisasikan.

#### b) Peran Serta dalam Proses Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan program Bantuan Kredit Mikro Nagari yang menggunakan pola syari'ah, secara otomatis akan melibatkan masyarakat yang telah pasti untuk menerima

dana bantuan kredit. Karena, dana yang akan mereka terima tidak akan bisa diwakilkan dari pihak manapun untuk dapat dikeluarkan oleh pihak BMT. Dan pelaksanaannya pun juga dilakukan oleh pihak yang terkait yang telah mendapatkan dana bantuan kredit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.**  
**Tanggapan responden terhadap peran serta dalam proses pelaksanaan program**

No	Alternatif Jawaban	F	(%)
1.	Tinggi terhadap peran serta dalam proses pelaksanaan program	7	23,33
2.	Sedang terhadap peran serta dalam proses pelaksanaan program	13	43,34
3.	Rendah terhadap peran serta dalam proses pelaksanaan program	10	33,33
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan program dikategorikan “Sedang”. Karena 7 (23,33 %) responden menanggapi tinggi, sedangkan 10 (33,33 %) responden menanggapi rendah dan mayoritas responden yaitu 13 (43,33 %) menanggapi sedang. Berdasarkan pada data tersebut di atas, peneliti menganalisisnya bahwa proses penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh pihak BMT, berjalan dengan baik sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka penyaluran dana untuk masyarakat penerima bantuan kredit. Tahapan-tahapan prosedur telah dijalani dengan baik oleh pihak BMT, sehingga dana bantuan akhirnya samapai kepada masyarakat. Berbeda halnya dengan tanggung jawab masyarakat dalam masalah pengembalian angsuran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Di lapangan, banyak ditemukan masyarakat yang tidak tepat pada waktunya untuk mengembalikan angsuran kreditnya. Sehingga tanggung jawab masyarakat masih Sedang untuk bisa dijalankan apa

yang telah mereka sepakati pada awalnya. Sejalan dengan tanggung jawab itu, penggunaan dana bantuan kredit yang diterima oleh masyarakat juga terlihat Sedang. Terbukti dari pengakuan masyarakat saat dijumpai, mengatakan bahwa tidak sepenuhnya dana yang mereka dapatkan mereka pergunakan sesuai dengan akad serah terima yang mereka ucapkan saat kredit bantuan tersebut akan diserahkan kepada mereka. Seharusnya, dana tersebut harus mereka pergunakan sesuai dengan apa yang telah mereka janjikan dan mereka ucapkan. Karena dalam hal ini pertanggungjawabannya bukanlah kepada manusia tetapi kepada Allah SWT, yang mana program yang mereka jalankan menggunakan sistem syari'ah. Mereka menjalankan perjanjian sesuai hukum syari'at Islam dan mengucapkan janji berdasarkan janji Islam. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan program dinyatakan "Sedang" untuk secara keseluruhannya.

c) *Peran Serta dalam Pemantauan Program*

Dalam menjalankan suatu program, ada tahapan yang memang seharusnya dijalankan agar program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan pada awal program akan dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah merumuskan alternatif-alternatif apa saja yang akan dilakukan agar bisa mendapat hasil yang maksimal, pelaksanaan dari alternatif rumusan yang dipilih, dan akhirnya mengevaluasi atau memantau apakah program telah berjalan sesuai dengan yang di inginkan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.**

**Tanggapan responden terhadap peran serta dalam pemantauan program**

No.	Alternatif Jawaban	F	(%)
1.	Tinggi terhadap peran serta dalam pemantauan program.	2	6,67
2.	Sedang terhadap peran serta dalam pemantauan program	20	66,67
3.	Rendah terhadap peran serta dalam pemantauan program	8	26,66
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam proses pemantauan program dinilai tinggi oleh 2 (6,67 %) responden, sedangkan untuk kategori sedang ditanggapi oleh 20 (66,67 %) responden dan 8 (26,66 %) responden menanggapi rendah untuk peran serta dalam pemantauan program. Sehingga untuk keseluruhannya tanggapan responden terhadap peran serta dalam pemantauan program dikategorikan "Sedang". Berdasarkan pada data tersebut di atas, peneliti menganalisisnya bahwa partisipasi masyarakat di nilai Sedang dalam keikutsertaan untuk memantau program yang telah dilakukan. Karena banyak masyarakat yang tidak datang untuk menghadiri pertemuan yang jadwalnya telah ditetapkan itu. Sebagaimana telah diketahui, dalam menjalankan suatu program pada akhirnya program tersebut memerlukan evaluasi untuk mengetahui apakah program yang dijalankan telah tepat pada sasaran hingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan atau sebaliknya. Dan di sini diharapkan sekali partisipasi masyarakat untuk dapat menghadiri kegiatan evaluasi dari program yang mereka jalani. Program yang dijalankan dengan menggunakan sistem syari'ah ini, juga mengharapkan partisipasi bagi yang menerima dana bantuan untuk dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan setiap bulannya. Tapi dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dinilai Sedang dalam mengikuti kegiatan rutin tersebut. Hingga pada akhirnya, tujuan program yang dijalankan dengan pola syari'ah ini, tidak dapat tercapai dengan baik.

**2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil**

Dalam menjalankan suatu program atau kegiatan, diharapkan adanya pencapaian tujuan dari apa-apa yang telah diharapkan dan direncanakan pada awalnya. Namun dalam perjalanannya untuk dapat mencapai tujuan

yang diinginkan, tidak semua tahapan dari pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam program BKMN yang menggunakan pola BMT juga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informan* dan observasi di lapangan, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

a. *Komunikasi berupa Informasi*

Dalam menjalankan suatu kegiatan/program, sosialisasi sangat diperlukan sekali untuk kelancaran dari pelaksanaan program. Dimana sosialisasi yang berupa komunikasi antara beberapa pihak BMT yang mengeluarkan dana bantuan dengan masyarakat yang menerima dana bantuan kredit sangat perlu sekali adanya untuk dapat memberitahukan apa-apa saja kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan harus turut sertanya/partisipasi masyarakat penerima bantuan kredit dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak BMT untuk masyarakat yang menjalankan usahanya dengan dana bantuan kredit yang mereka terima.

Kelancaran komunikasi sangat berperan penting dalam setiap kegiatan yang ingin dilakukan, karena kegiatan yang dilakukan melibatkan langsung unsur manusia dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan masa-lah yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemantauan program yang telah mereka jalankan. Untuk melaksanakan kegiatan peninjauan program dan pertemuan berkala yang diadakan setiap bulannya. Pihak BMT harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat agar pemberitahuan akan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tersampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat.

Pihak BMT tidak memberikan informasi secara maksimal kepada masyarakat yang diharapkan untuk turut serta kegiatan yang diadakan terkait dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap melaksana-

kan suatu kegiatan, perlu adanya evaluasi akan kegiatan yang telah dijalankan atau dilaksanakan oleh mereka yang menjalankan program itu sendiri. Tanpa adanya informasi yang tepat dan baik, maka apa yang telah direncanakan untuk tidak dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Media informasi yang minim sekali dilakukan oleh pihak BMT, terbukti dengan hasil wawancara dengan salah satu *Key Informan* bahwa informasi hanya diberikan di mesjid tiap bulan sekalinya dan tidak ada alternatif penyampaian informasi lainnya yang bagus kepada masyarakat. Seharusnya agar masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan yang diharapkan, maka hendaknya lebih memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Misalnya dengan menempelkan pemberitahuan di papan-papan pengumuman yang ada di mesjid, dekat kantor BMT Nagari atau kawasan-kawasan yang memang masih menjadi bagian dari Nagari Ampang Gadang itu sendiri.

b. *Kepedulian Masyarakat*

Kepedulian masyarakat dapat ditinjau dari:

- Sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan peninjauan usaha yang dilakukan dan peran serta dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap bulan di mesjid. Kehadiran masyarakat penerima bantuan kredit dalam kegiatan peninjauan usaha yang dijalankan dan kehadiran masyarakat penerima bantuan kredit dalam kegiatan keagamaan yang diadakan di mesjid yang termasuk dalam indikator peran serta pemantauan program.
- Sedikitnya masyarakat yang bisa mengajukan usulan jenis kegiatan yang mereka jalankan dengan sendirinya. Kebanyakan dari masyarakat menyerahkan kepada pihak BMT untuk memberikan usulan kegiatan yang baik untuk mereka jalankan.
- Mereka tidak memahami dengan baik maksud dan tujuan dari program yang

mereka jalankan yaitu berupa pemahaman masyarakat terhadap program BKMN yang menggunakan Pola BMT. Sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak BMT.

yang kurang baik dan rendahnya kepedulian masyarakat, mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program BKMN yang menggunakan pola BMT. Sehingga tujuan tidak dapat dicapai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti lakukan tentang Partisipasi masyarakat dalam Program BKMN yang menggunakan Pola BMT, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam program bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek dikategorikan “Sedang” dengan jumlah responden yang menanggapi sedang sebanyak 22 (73,33 %) responden. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat penerima bantuan kredit dalam kegiatan yang diadakan setiap bulannya di mesjid sebagai tanda program pemerintah yang dijalankan dengan sistem syari’ah dan kegiatan peninjauan usaha yang telah dijalankan yang waktu pertemuannya akan dikondisikan pada saat akan dilaksanakan. Masyarakat penerima bantuan kredit juga kurang peran sertanya dalam mengajukan usulan jenis kegiatan yang mereka jalankan. Sehingga partisipasi masyarakat di nilai sedang dalam menjalankan program yang menggunakan sistem syari’ah ini.
2. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor penyampaian informasi

## DAFTAR RUJUKAN

- Cohen, 1997, *Rudal Development Partisipation*, Cornel Univ Press, Jakarta.
- Mubyarto, 2000, *Administrasi Pembangunan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- NitiseMITO Alex, 1993, *Partisipasi Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Prijono, Onny S dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Siagian. S.P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudriamunawar Haryono, 2006, *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*, Mandar Maju, Bandung.
- Sumarto, Hetifah Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Widiputranti, Christine Sri, 2005, *Pemberdayaan Kaum Marginal*, APMD Press, Yogyakarta.
- Wuryantono Thaeodorus, dkk, 2005, *Komunikasi Pemberdayaan*, APMD Press, Yogyakarta.